

BAB V

ANALISIS DAN INTERPRETASI

5.1 Analisis Kebutuhan Bisnis dan Informasi

Analisis pada tahap ini merupakan tahapan penting dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi karena menentukan cakupan perencanaan strategis sistem informasi dan memberikan dasar bagi perumusan strategi sistem informasi. Analisis ini akan membantu pemahaman tentang kondisi lingkungan organisasi dengan melihat dampak dan potensi SI/TI terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Dengan mengidentifikasi kebutuhan SI/TI serta peluang yang timbul diharapkan dapat disusun prioritas kebutuhan dan penggunaan SI/TI untuk mendukung pencapaian strategi organisasi.

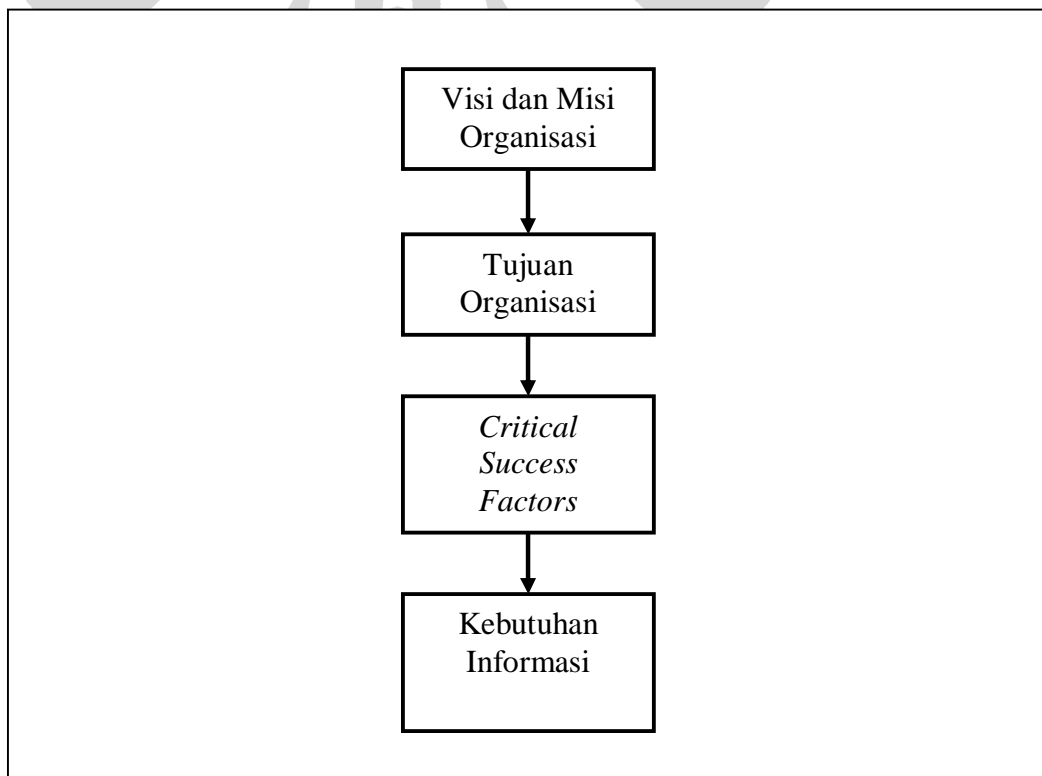
Kegiatan analisis meliputi kondisi lingkungan proses dan kondisi SI/TI baik dilihat dari sisi internal dan eksternal.

Masukan kegiatan analisis ini diperoleh dari dokumen organisasi, hasil wawancara dengan beberapa pejabat atau staf yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (lihat Lampiran A tentang transkrip wawancara), hasil pengamatan proses kerja dan kondisi SI/TI internal organisasi, serta informasi berbagai trend perkembangan SI/TI yang ada saat ini. Keluaran dari keseluruhan tahapan analisis ini mencakup kebutuhan informasi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang harus dipenuhi oleh SI/TI,

kondisi SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta saat ini, dan peluang pemanfaatan trend perkembangan SI/TI saat ini. Adapun perangkat atau metode analisis yang digunakan adalah metoda CSF, analisis SWOT, analisi Value Chain, dan model McFarlan's Strategic Grid.

5.1.1 Identifikasi Informasi Organisasi

Dalam kegiatan ini akan dielaborasi visi dan misi menjadi tujuan bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang kemudian akan diaplikasikan menggunakan CSF analisis untuk menemukan kebutuhan informasi dari organisasi. Langkah-langkah elaborasi tersebut dapat dijabarkan pada gambar 5.1.



Gambar 5.1 Langkah-langkah Elaborasi Tujuan Organisasi

Visi

“Terwujudnya masyarakat Purwakarta yang aman, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa menuju Wibawa Karta Raharja.”

Misi

- a) Mewujudkan budaya hukum dan tertib hukum demi terciptanya kesadaran, kepatuhan dan ketertiban hukum masyarakat.
- b) Menciptakan iklim politik yang kondusif bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis berdasarkan nilai-nilai agama, etika, moral dan budaya Pancasila.
- c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang bertitik berat pada penguatan basis pertanian dan industri serta mengembangkan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat, di samping memfasilitasi berkembangnya PMA dan PMDN dalam rangka penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi persaingan global dengan mengoptimalkan keunggulan kooperatif.
- d) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia.

- e) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- f) Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
- g) Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tertuang dalam “Arah Kebijakan Pembangunan” yang dapat dilihat pada tabel Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan Utama dan CSF Organisasi Pemkab Purwakarta

No	Tujuan Utama	CSF	Prime Measures
1	Peningkatan Bidang Ekonomi	Penarikan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pajak Hotel • Pendapatan Pajak Restoran • Pendapatan Pajak Hiburan • Pendapatan Pajak Reklame • Pendapatan Pajak Penerangan Jalan • Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C • Pendapatan Pajak Parkir
		Perolehan Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Dana Bagi Hasil • Pendapatan Dana Alokasi Umum • Pendapatan Dana Alokasi Khusus
		Melakukan Pinjaman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pinjaman domestic • Pendapatan Pinjaman Luar

			negeri
		Penetapan APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Perolehan Dana Perimbangan • Perolehan Pinjaman
2	Peningkatan Bidang Keamanan dan Ketertiban	Memperkuat Keamanan dan Menjaga Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban
3	Peningkatan Bidang Pendidikan	Peningkatan lebih dari 50% dari : <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Angka Melek Huruf (AMH) • Jumlah sarana dan prasarana pendidikan • Jumlah partisipasi belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ranking bidang pendidikan di Jabar
4	Peningkatan Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial	Menurunkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat kesejahteraan masyarakat di Jabar
5	Peningkatan Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan WNA • Kedatangan Wisatawan Nusantara

Pencapaian tujuan-tujuan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta jelas sangat dipengaruhi oleh *business need* yang tertuang pada tabel diatas, selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan informasi yang mendukung *business need* organisasi maka perlu dilakukan elaborasi terhadap CSF organisasi dengan menentukan *Key Decision* yang berhubungan dengan CSF tersebut, dan dari *Key Decision* tersebut akan diidentifikasi kebutuhan informasi dari organisasi. Hasil elaborasi CSF dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Identifikasi Kebutuhan Informasi Organisasi

No	CSF	Key Decision	Kebutuhan Informasi
1	Penarikan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pajak Hotel • Pendapatan Pajak Restoran • Pendapatan Pajak Hiburan • Pendapatan Pajak Reklame • Pendapatan Pajak Penerangan Jalan • Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C • Pendapatan Pajak Parkir 	Informasi Sumber Pajak Daerah
	Perolehan Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Dana Bagi Hasil • Pendapatan Dana Alokasi Umum • Pendapatan Dana Alokasi Khusus 	Informasi APBN
	Melakukan Pinjaman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pinjaman domestic • Pendapatan Pinjaman Luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Institusi atau lembaga pemberi modal
	Penetapan APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Perolehan Dana Perimbangan • Perolehan Pinjaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Pendapatan Daerah
2	Memperkuat Keamanan dan Menjaga Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Keamanan dan Ketertiban di Daerah
3	Peningkatan lebih dari 50% dari : <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Angka Melek Huruf (AMH) • Jumlah sarana dan prasarana pendidikan • Jumlah partisipasi belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ranking bidang pendidikan di Jabar 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Prosentase Faktor Keberhasilan Pendidikan
4	Menurunkan jumlah penduduk dibawah	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat kesejahteraan masyarakat di Jabar 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Statistik Penduduk

	garis kemiskinan		
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan WNA • Kedatangan Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pariwisata

Value system yang merupakan nilai tambah pada pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan SI/TI dapat dilihat pada identifikasi peluang SI/TI pada sub bab berikutnya.

5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi

Secara umum lingkungan eksternal organisasi dapat diidentifikasi melalui analisa Politik, Ekonomi, Sosial dan Hukum. Hasil dari analisis lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi *opportunities dan thread* dalam SWOT analisis.

- **Aspek Politik**

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi pemerintah yang dalam melakukan tugas-tugasnya dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan melalui Gubernur satu kali dalam setahun serta perlu disampaikan pula laporan pertanggungjawaban tersebut kepada DPRD dan disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

- **Aspek Ekonomi**

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi pemerintah yang berorientasi pada layanan masyarakat non profit, dalam kegiatan

sehari-harinya pada bidang keuangannya dianggarkan langsung oleh pemerintah pusat melalui pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

- **Aspek Sosial**

Aspek sosial sangat mempengaruhi keberadaan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana Daerah Purwakarta merupakan salah satu bagian dari masyarakat Jawa Barat namun secara sosial dapat dilihat banyaknya pendatang dari luar Jawa Barat sendiri, seperti dari Batak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, dan lain-lain. Hal inilah yang menambah khasanah sosial penduduk yang harus diperhatikan dan dicermati sebagai salah satu modal.

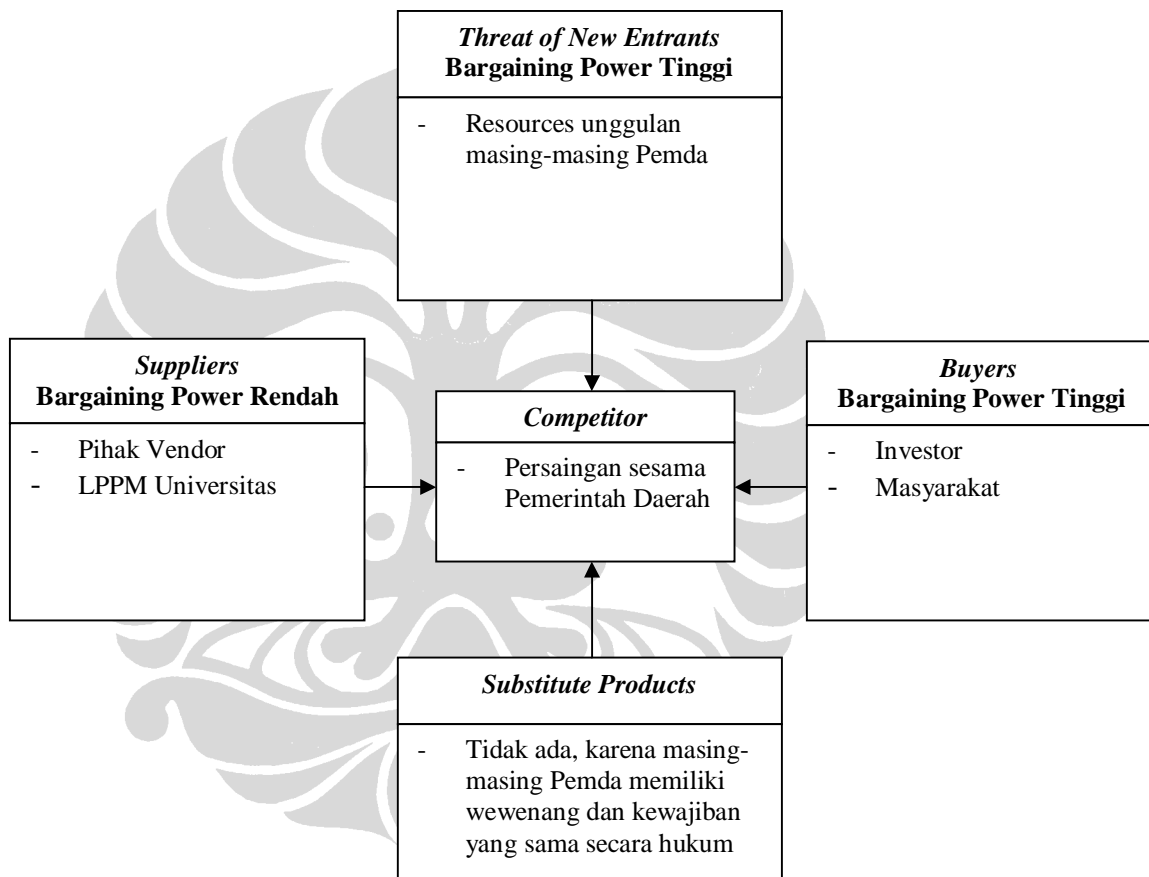
- **Aspek Hukum**

Aspek hukum yang mempengaruhi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, terkait pada aspek politik, apalagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah organisasi pemerintah, yang kegiatannya bergantung pada aspek politik dari pemerintah yang berkuasa. Sehingga kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan Pemerintah.

- **Analisis *Five Competitive Forces Model***

Dengan analisis *five forces competitive model* ini akan memetakan hal-hal apa saja yang berasal dari luar organisasi Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, baik yang berkorelasi secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk lembaga pemerintah analisis *five forces competitive model* akan dimodifikasi sedikit agar dapat menyesuaikan dengan ruang hidup dari organisasi pemerintah ini, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai contoh kasusnya, yang hasilnya akan dipetakan dalam bagian *opportunities* dan *threats* pada diagram SWOT. Analisis tersebut akan terlihat seperti pada gambar 5.2 dibawah ini.



Gambar 5.2 Pemetaan Hasil Analisis *Five Forces Competitive Model*

5.1.3 Analisis Lingkungan Internal Organisasi

Analisis internal merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan strategis SI/TI organisasi. Dari analisis internal ini akan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi.

5.1.3.1 Analisis *Value Chain*

Analisa Value Chain merupakan suatu metode untuk merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan, menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Analisa *Value Chain* terhadap organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Uraian tentang seluruh aktivitas yang termasuk dalam aktivitas utama dan mendukung akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Infrastructure

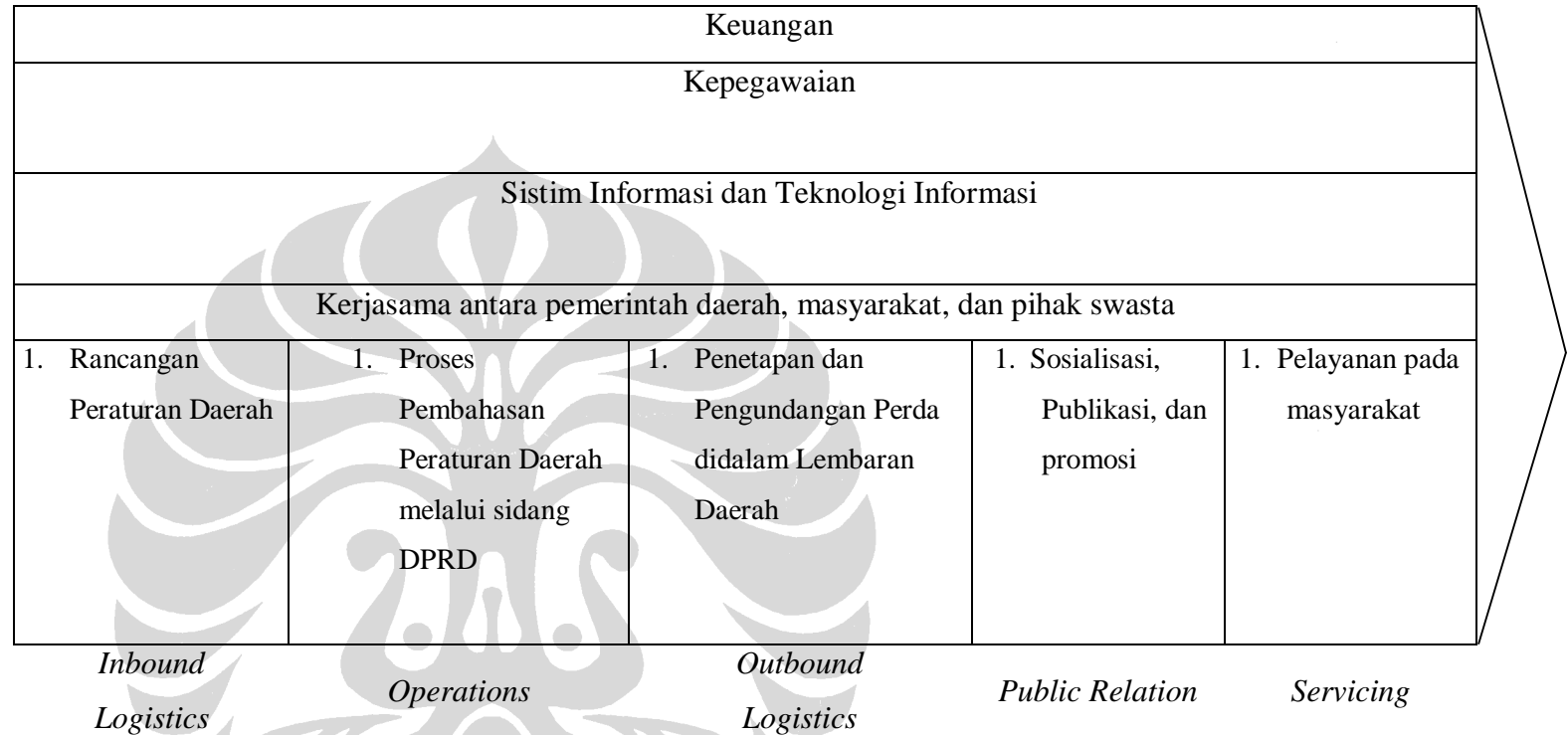
Human Resources

Management

Technology

Development

Procurement



Gambar 5.3 *Value Chain* Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

- **Aktivitas Utama**

Yang menjadi aktivitas utama yang terdapat pada analisa *value chain* organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah
2. Proses Pembahasan Peraturan Daerah melalui sidang DPRD
3. Pengundangan Perda didalam Lembaran Daerah
4. Pengundangan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah didalam Berita Daerah
5. Sosialisasi, publikasi, dan promosi.
6. Pelayanan pada masyarakat.

a Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah merupakan proses perencanaan peraturan daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati. Pengajuan Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilegalisasi melalui sidang antara pemerintah daerah dan DPRD.

b Proses Pembahasan Peraturan Daerah melalui sidang DPRD

Proses ini merupakan penentuan akhir dari penetapan Peraturan Daerah melalui mekanisme sidang DPRD bersama pemerintah daerah, Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan:

- Pembicaraan tingkat pertama, meliputi:
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 2. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul, prakarsa DPRD.
- Pembicaraan tingkat kedua, meliputi:
 1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah:
 2. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD:
- Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- Pembicaraan tingkat keempat, meliputi:
 1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 2. Penyampaian sambutan, Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

c Penetapan dan Pengundangan Perda didalam Lembaran Daerah

Persetujuan rancangan Perda oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang kemudian diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Kepala Daerah untuk dijadikan Perda. Hasil Perda ini kemudian diundangkan didalam Lembaran Daerah untuk disosialisasikan melalui Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah yang tertuang pada Berita Daerah.

d Sosialisasi, Publikasi, dan Promosi

Pada tahap ini merupakan aktivitas penyampaian hasil-hasil pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah dan hasil-hasilnya yang telah dilakukan, serta program-program apa saja yang kelak akan dilakukan.

e Pelayanan Pada Masyarakat

Pada tahap ini, aktifitas yang dilakukan adalah melakukan pelayanan pada masyarakat, dengan berbagai cara, seperti melakukan pemasyarakatan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta serta dengan mengimplementasikan sarana dan prasarana pembangunan yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

• Aktivitas Pendukung

Aktivitas-aktivitas yang menjadi pendukung, yang dihasilkan dari analisa *value chain* terhadap organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Keuangan

2. Kepegawaian
3. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
4. Kerjasama dalam dan luar negeri

a Keuangan

Aktivitas Keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada perundang-undangan:

- a. Menentukan target pendapatan daerah;
- b. Menentukan perencanaan pembelanjaan dan pembiayaan daerah;
- c. Menetapkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas persetujuan DPRD.

b Kepegawaian

Aktivitas kepegawaian adalah aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, yang melakukan fungsi:

- a. penyusunan mutasi dan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM dan pendidikan serta pelatihan;
- c. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

c Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Aktivitas Sistem Informasi dan Teknologi Informasi adalah aktivitas yang melaksanakan pengembangan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta dan pengadaan, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah yang dikoordinir oleh Sekretariat Daerah melalui Asisten Daerah II Bidang Pembangunan bagian Hubungan Masyarakat.

d Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Pihak Swasta

Aktivitas kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta adalah aktifitas yang melakukan kegiatan pengkajian dan menyiapkan bahan hubungan kerjasama teknis antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta, pemantauan dan evaluasi hubungan kerjasama teknis antar pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta, pemberian informasi dan penilaian pelaksanaan dan kerjasama teknis di segala bidang pembangunan daerah

5.1.3.2 Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*)

Analisa SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi; kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal; peluang atau kesempatan dan keuntungan dari faktor eksternal dan ancaman atau resiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal organisasi.

Dari data yang didapat dari analisis lingkungan eksternal dan analisis internal, maka dapat dilakukan analisis SWOT terhadap organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, seperti terlihat pada tabel 5.3.

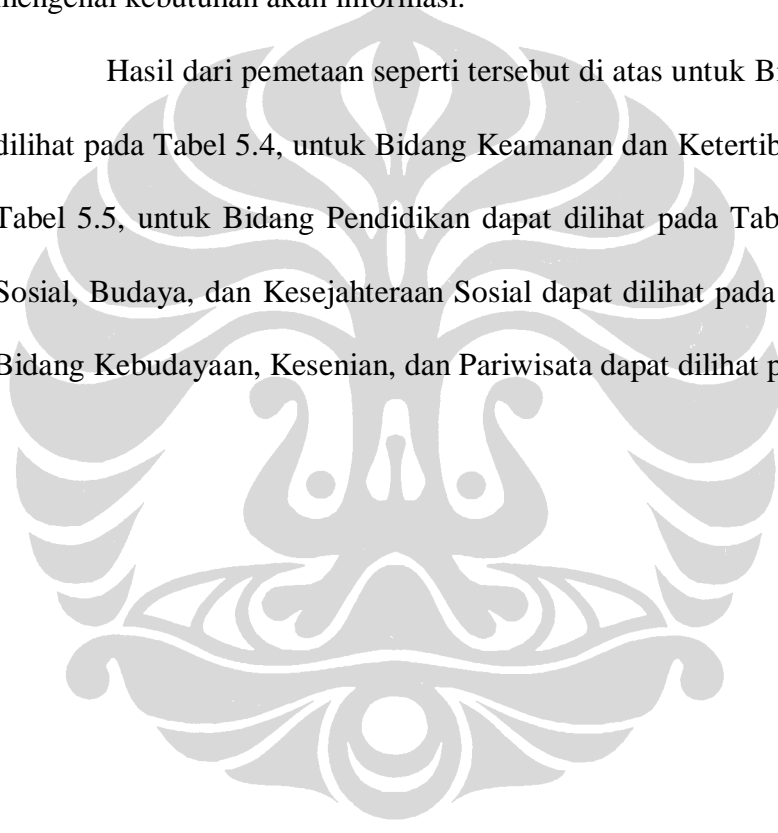
Tabel 5.3 Analisis SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalisasi Pemerintah Daerah 2. Sumber Daya Lokal yang berlimpah 3. Penggunaan SI/TI pada tingkat operasional disetiap SKPD 4. Adanya Tupoksi setiap SKPD sebagai pedoman kerja 5. Tupoksi SKPD yang selaras dengan Visi dan Misi serta tujuan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah sosial yang belum terselesaikan 2. Koordinasi antar SKPD kurang intensif 3. Belum adanya pedoman pengembangan SI/TI 4. Kurangnya SDM dalam bidang SI/TI 5. Tidak adanya Pusdatin di tiap SKPD 6. Tidak adanya Tim SI/TI di tiap SKPD 7. Pendanaan SI/TI yang kurang
Peluang (O)	Upaya memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Upaya menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak Geografis Purwakarta yang merupakan pintu gerbang menuju Ibukota Negara RI dan Ibukota Provinsi Jawa Barat 2. Peluang investasi dibidang industri, peternakan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata 3. Bargaining Power Vendor dan LPPM Univesitas yang rendah 4. Bargaining Power Substitute Produk yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi daerah dengan meraih keuntungan disektor industri, peternakan perikanan, pertanian dan pariwisata 2. Promosi sumber daya daerah 3. Pemanfaatan LPPM untuk menganalisa, merencanakan, dan memanfaatkan teknologi 4. Menarik Investor baik dalam negeri dan Luar negeri 5. Promosi Pariwisata 6. Promosi Hasil-Hasil Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangkitkan idustri menengah dan industry kecil 2. Implementasi pemanfaatan Teknologi SI/TI 3. Pengelolaan SDM SI/TI melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 4. Penyediaan Infrastruktur SI/TI
Ancaman (T)	Upaya memakai kekuatan guna mengatasi ancaman	Upaya memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman datang dari sesama pemerintah daerah untuk menarik investor asing dan dalam negeri masuk kedaerahnya 2. Kondisi Politik Daerah 3. Kondisi Ekonomi Daerah 4. Kondisi Sosial Daerah 5. Bargaining Power Pendatang Baru yang tinggi 6. Bargaining Power Customer tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan dengan mempermudah birokrasi 2. Menjaga stabilitas Sosial dan Politik daerah 3. Meningkatkan pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar SKPD intensif 2. Penyelesaian masalah sosial 3. Pemanfaatan Teknologi SI/TI

5.1.4 Analisis Kebutuhan Informasi

Analisis kebutuhan informasi disini digunakan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi *critical success factor* (CSF) dari masing-masing unit kerja. Dan dari setiap CSF dilakukan pemetaan dengan menggunakan hasil yang didapat dari analisis SWOT, guna menyelaraskan identifikasi yang didapat dari CSF dengan identifikasi yang didapat dari SWOT, guna mendapatkan informasi mengenai kebutuhan akan informasi.

Hasil dari pemetaan seperti tersebut di atas untuk Bidang Ekonomi dapat dilihat pada Tabel 5.4, untuk Bidang Keamanan dan Ketertiban dapat dilihat pada Tabel 5.5, untuk Bidang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.6, untuk Bidang Sosial, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel 5.7 serta untuk Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 5.8.



Tabel 5.4 Analisa Kebutuhan Informasi Bidang Ekonomi

Tujuan	CSF	Prime Measure	Strategi SWOT	Value Chain	Kebutuhan Informasi
Peningkatan Bidang Ekonomi	Penarikan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pajak Hotel • Pendapatan Pajak Restoran • Pendapatan Pajak Hiburan • Pendapatan Pajak Reklame • Pendapatan Pajak Penerangan Jalan • Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C • Pendapatan Pajak Parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ekonomi daerah dengan meraih keuntungan disektor industri, peternakan perikanan, pertanian dan pariwisata • Menarik Investor baik dalam negeri dan Luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan Pengundangan Perda didalam Lembaran Daerah • Sosialisasi, Publikasi, dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Sumber Pajak Daerah • Informasi APBN • Informasi Institusi atau lembaga pemberi modal • Informasi Pendapatan Daerah • Informasi Perda
	Perolehan Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Dana Bagi Hasil • Pendapatan Dana Alokasi Umum • Pendapatan Dana Alokasi Khusus 			
	Melakukan Pinjaman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pinjaman domestic • Pendapatan Pinjaman Luar negeri 			
	Penetapan APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Pendapatan Asli 			

		Daerah (PAD) <ul style="list-style-type: none"> • Perolehan Dana Perimbangan • Perolehan Pinjaman 			
--	--	---	--	--	--

Tabel 5.5 Analisa Kebutuhan Informasi Bidang Keamanan dan Ketertiban

Tujuan	CSF	Prime Measure	Strategi SWOT	Value Chain	Kebutuhan Informasi
Peningkatan Bidang Keamanan dan Ketertiban	Memperkuat Keamanan dan Menjaga Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga stabilitas Sosial dan Politik daerah • Penyelesaian masalah sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan Pengundangan Perda didalam Lembaran Daerah • Pelayanan masyarakat pada 	Informasi Keamanan dan Ketertiban di Daerah

Tabel 5.6 Analisa Kebutuhan Informasi Bidang Pendidikan

Tujuan	CSF	Prime Measure	Strategi SWOT	Value Chain	Kebutuhan Informasi
Peningkatan Bidang Pendidikan	Peningkatan lebih dari 50% dari : <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Angka Melek Huruf (AMH) • Jumlah sarana dan prasarana pendidikan • Jumlah partisipasi belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ranking bidang pendidikan di Jabar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan LPPM untuk menganalisa, merencanakan, dan memanfaatkan teknologi • Pengelolaan SDM SI/TI melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, Publikasi, dan promosi • Pelayanan pada masyarakat 	Informasi Prosentase Faktor Keberhasilan Pendidikan

Tabel 5.7 Analisa Kebutuhan Informasi Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Tujuan	CSF	Prime Measure	Strategi SWOT	Value Chain	Kebutuhan Informasi
Peningkatan Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial	Menurunkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peringkat kesejahteraan masyarakat di Jabar 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangkitkan industri menengah dan industri kecil • Peningkatan ekonomi daerah dengan meraih keuntungan disektor industri, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan masyarakat pada • Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta 	Informasi Kependudukan

			peternakan perikanan, pertanian dan pariwisata		
--	--	--	--	--	--

Tabel 5.8 Analisa Kebutuhan Informasi Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata

Tujuan	CSF	Prime Measure	Strategi SWOT	Value Chain	Kebutuhan Informasi
Peningkatan Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kedatangan WNA • Kedatangan Wisatawan Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Pariwisata • Peningkatan ekonomi daerah dengan meraih keuntungan disektor industri, peternakan perikanan, pertanian dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, Publikasi,dan promosi • Pelayanan pada masyarakat 	Informasi pariwisata

5.1.5 Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI

Analisis lingkungan eksternal SI/TI dari organisasi dilakukan guna mendapatkan gambaran perkembangan SI/TI saat ini, yang meliputi perkembangan dan tren SI/TI serta tentang pengamanannya. Dari hasil analisis tersebut akan ditentukan bagaimana pemanfaatan SI/TI yang lebih baik dimasa depannya.

5.1.5.1 Tren TIK Nasional

Dewan TIK Nasional (DeTIKNas) adalah lembaga yang dipimpin oleh Presiden RI dan beranggotakan 11 Menteri, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.20 tahun 2006 tertanggal 13 November 2006 dengan masa kerja 3 tahun.

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2006, DeTIKNas bertugas:

- a Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c Melakukan koordinasi nasional meliputi dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya;
- d Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Selain itu, DeTIKNas menentukan Program *Flagship*, yaitu suatu program TIK yang menjadi fokus nasional, yaitu program yang memiliki dampak besar pada pemerintah, masyarakat, internasional, dan *least political resistance*. Program ini diambil satu dari tiap komponen *blueprint* TIK. Meskipun demikian, bukan berarti program yang lain tidak

berjalan, namun program *Flagship* ini nantinya akan menjadi dasar dari pengembangan program-program TIK lainnya sehingga lebih terarah dan berdaya guna.

Tugas pokok DeTIKNas adalah memberi rekomendasi tentang kebijakan pengembangan efisien dan efektif di Indonesia. Untuk prioritas program, DeTIKNas sudah meluncurkan inisiatif yang diberi nama *7 Flagship Program: e-Procurement, e-Anggaran, National Single Window (NSW), e-Education, Palapa Ring, legalisasi software pemerintah, dan Nomor Identitas Nasional (NIN)*. Selain itu, untuk pengembangan ICT, DeTIKNas memperkenalkan konsep ICT Economic, yang diringkas oleh Pak Kemal dengan jargon "*Less capex (capital expenditure), more opex (operational expenditure)*". Sebuah pikiran ekonomis dimana pemerintah sebaiknya tidak menanam modal untuk pengembangan ICT, tapi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan cukup menyewa *service* dari *vendor* dan *provider* yang sudah ada.

5.1.5.2 Tren Jaringan Komputer

Tren jaringan yang berkembang hingga saat ini telah berkembang begitu pesat, terutama jaringan intranet dan bahkan jaringan internet telah mendukung komunikasi data yang begitu cepat dan didukung fasilitas keamanan yang telah begitu baik.

Beberapa Jaringan LAN dapat digabungkan menjadi jaringan WAN, bahkan seakan-akan menjadi jaringan LAN yang besar karena jaringan yang terhubung seperti LAN pada umumnya, bukan seperti gabungan dari beberapa LAN.

Dari hal tersebut di atas maka biaya untuk mengimplementasikan jaringan komputer yang berbasis internet menjadi lebih murah, karena sudah ada penyedia layanan infrastruktur yang dapat membuat suatu jaringan antar unit-unit kerja yang berjauhan secara geografis, menjadi terhubung seperti layaknya suatu LAN.

5.1.5.3 Tren Aplikasi Sistem Informasi dan Database Pendukungnya

Perkembangan jaringan komputer juga diimbangi oleh perkembangan aplikasi dan database yang seiring dengan perkembangan jaringan komputer itu sendiri. Dimulai dari aplikasi yang hanya berjalan secara stand alone hingga sekarang menjadi aplikasi yang dapat bekerja *multi user*, bahkan dapat berjalan dalam *web base*, konsekuensi yang harus ditanggung adalah meningkatnya kebutuhan dan untuk memanfaatkan teknologi internet secara maksimal. Tidak hanya internet, aplikasi SI dan *database* berbasis *web* ini juga telah diterapkan pada *intranet* dan *ekstranet*, sesuai dengan kebutuhan internal organisasi.

Begitu pula dengan databasenya yang dahulu hanya database yang tidak begitu pintar, sekarang telah berkembang menjadi *database* yang begitu pintar, yang dapat memberikan respon secara terhadap permintaan yang diminta oleh si user, sehingga lebih mempermudah dalam pembuatan program aplikasinya.

Bahkan perkembangan aplikasi SI dan database yang berbasis *web* telah didukung oleh ketersediaan *software packet* dan banyak *vendor* maupun keberadaan *software house* yang memberikan layanan *outsourcing* pengembangan aplikasi secara *customization*, sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Alternatifnya lainnya, organisasi juga dapat mengembangkan atau memanfaatkan berbagai aplikasi SI dan database yang bersifat *open source*.

5.1.5.4 Tren Pengamanan SI/TI

Pengamanan SI/TI-pun tidak kalah cepatnya juga, karena dengan perkembangan tren *web base* yang begitu cepat menyebar, maka segi pengamanan pun menjadi lebih

diperhatikan. Hal ini menjadi konsekuensi terhadap terbukanya semua akses informasi dan komunikasi melalui internet.

Saat ini penggunaan teknologi seperti VPN (*Virtual Private Network*) untuk membangun dan mengamankan suatu *private network* secara *virtual* melalui internet, implementasi *firewall* sebagai pengaman jaringan internal organisasi, penggunaan teknik kriptografi untuk aplikasi *secure e-mail* dan teknologi sertifikat digital pada *Public Key Infrastructure* juga sudah banyak digunakan dalam melakukan pengiriman data pada media internet untuk menjaga keamanan data yang dikirimnya.

Bahkan standar manajemen keamanan pun telah berkembang sampai pada standar manajemen keamanan informasi BS 7799/ISO 17799.

5.1.6 Analisis Lingkungan Internal SI/TI

Analisis lingkungan internal SI/TI dari organisasi dilakukan guna mendapatkan gambaran SI/TI organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta saat ini. Menurut Turban, infrastruktur SI/TI adalah fasilitas fisik, layanan, dan manajemen yang mendukung semua sumber daya komputasi pada sebuah organisasi [Turban et al, 1996]. Ada lima infrastruktur SI/TI, yaitu *Computer Hardware* atau perangkat keras komputer, *General Purpose Software* atau perangkat lunak yang umum digunakan, *Networks and Communications Facilities* atau fasilitas jaringan dan komunikasi, *Database* (basisdata), dan *Information Management Personnel* atau personil manajemen informasi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didapatkan kesimpulan terpenuhinya lima unsur infrastruktur SI/TI, namun secara keseluruhan didapatkan kesimpulan belum adanya satu bagian khusus yang menangani

SI/TI, namun masih ada perencanaan dan pengelolaan SI/TI yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

5.1.6.1 Perangkat Keras SI/TI

Keadaan perangkat keras SI/TI yang ada saat ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan kuesioner, semuanya tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana komputer yang dioperasikan masih ada yang menggunakan *PC* Pentium I hingga ada yang menggunakan *PC* ataupun *laptop* yang berprosesor *core 2 duo*.

Dari segi kualitas perangkat keras yang dimiliki dimasing-masing SKPD sudah mencukupi, namun di beberapa SKPD berdasarkan kuesioner dan pengamatan secara kuantitas belum mencukupi dengan beban kerja yang dihadapi. Pada Sekretariat Daerah terlihat setiap bagian hanya memiliki maksimal hanya 2 *pc* yang dipakai secara bergantian, sehingga pemberian pelayanan administrasi bagi masyarakat secara waktu kurang optimal.

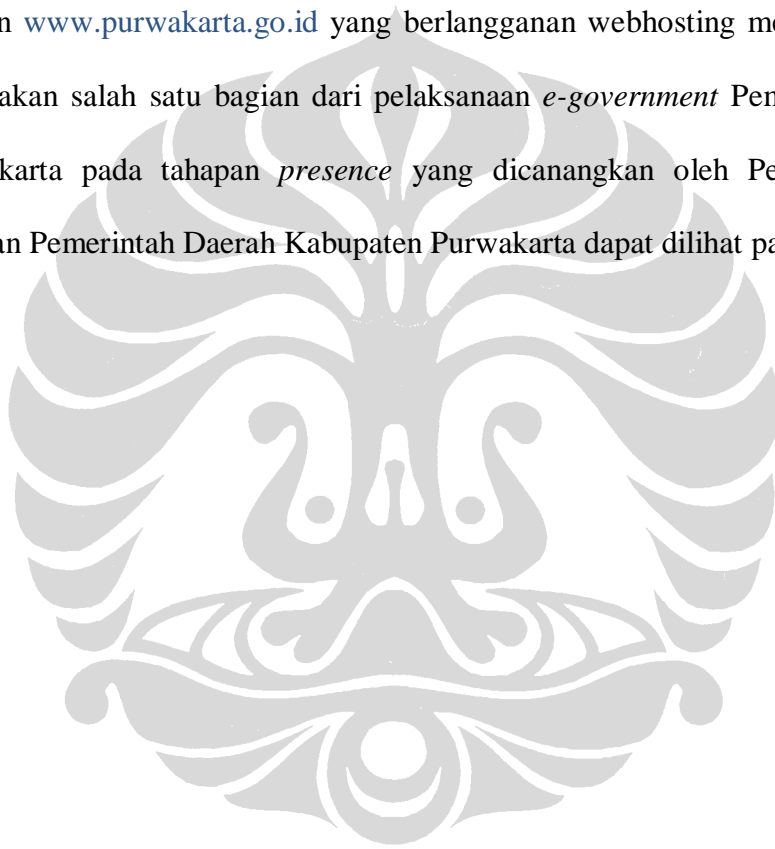
Hal tersebut juga terlihat juga pada beberapa SKPD seperti Disnaker (antrian panjang dalam pembuatan kartu kuning), BKD dan Diklat (*entry* data PNS dan Honor Daerah yang memerlukan waktu cukup lama), Bapeda (antrian pemasukan anggaran keuangan di tiap-tiap SKPD).

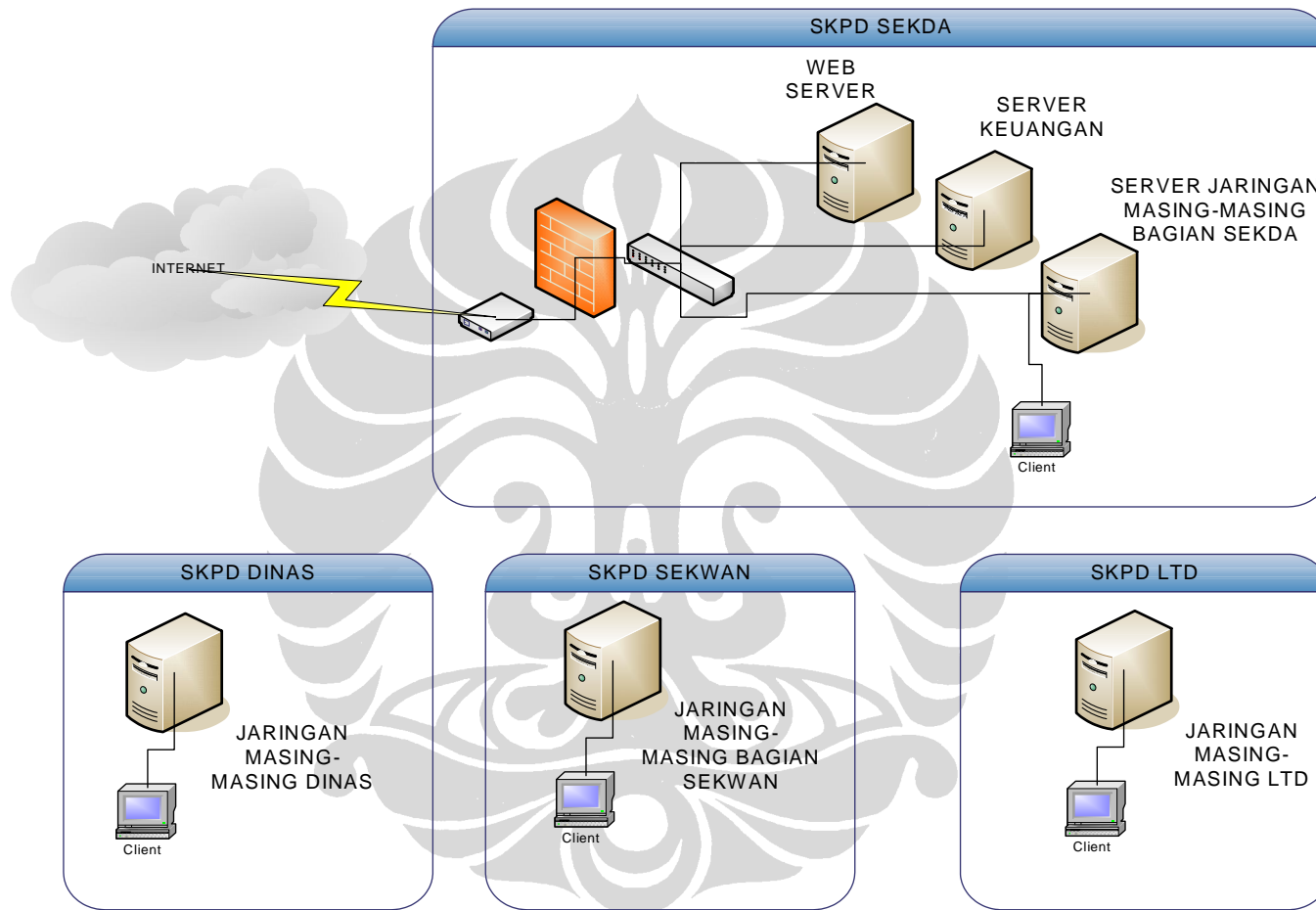
5.1.6.2 Fasilitas Jaringan

Berdasarkan hasil dari kuesioner dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan SKPD tidak terhubung dalam satu jaringan terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, namun masih sebagian kecil SKPD yang mengimplementasikan jaringan berbasis

workgroup dimasing-masing SKPD, dan hal ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan khusus dibidang komputer. Hal inilah yang mengakibatkan masih sulitnya koordinasi antar SKPD dikarenakan *database* yang masih bersifat pulau-pulau dan sebagian besar SKPD belum memiliki *database* khusus, sehingga sebagian besar data disimpan dalam bentuk *spreadsheet* atau *document*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta juga sudah memiliki web server dengan domain www.purwakarta.go.id yang berlangganan webhosting melalui Telkom. Fasilitas ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan *e-government* Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta pada tahapan *presence* yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Topologi jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar 5.4.





GAMBAR 5.4 Topologi Jaringan Komputer Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

5.1.6.3 Perangkat Lunak SI/TI

Keadaan perangkat lunak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta saat ini juga bervariasi. Mulai dari sistem operasi, ada yang menggunakan sistem operasi *windows 98*, *windows XP*, dan *linux*.

Aplikasi yang digunakan untuk sistem perkantoran kebanyakan menggunakan aplikasi *Ms Office* dan sistem perkantoran bawaan dari sistem operasi *Linux*.

Sistem aplikasi untuk pengolahan data pun bervariasi juga, misalnya pada Sekretariat Daerah untuk sistem anggaran masih menggunakan aplikasi *PHP*, sistem perijinan bagi PMA dan PMDN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan *visual foxpro*, Sistem Kepegawaian Nasional (SimPegNas) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menggunakan *PHP* secara *intranet* melalui *internet* yang terkoneksi ke Badan Kepegawaian Nasional.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi dari setiap aplikasi SI yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap pelaksanaan tugas organisasi, maka seluruh aplikasi SI dipetakan dengan menggunakan model *McFarlan Strategic Grid* seperti pada tabel 5.9.

Tabel 5.9 Portofolio Aplikasi SI Pemda Kabupaten Purwakarta

<i>Strategic</i>	<i>High Potential</i>
SI Anggaran SI Perijinan Usaha PMA dan PMDN	
Ms. Office (Word dan Excel) Web Browser	E-Mail System
<i>Key Operational</i>	<i>Support</i>

5.1.6.4 Perangkat Database

Keadaan database yang ada dan digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, juga bervariasi bergantung pada program aplikasi yang digunakan, seperti bila menggunakan *visual foxpro* akan menggunakan database bawaan dari *visual foxpro* itu sendiri dan bila menggunakan *php* akan menggunakan *mysql*.

5.1.6.5 Personil Manajemen Informasi

Personil yang menangani sistem informasi tersebar disemua unit kerja, mereka tidak terkumpul dalam satu unit kerja, keseluruhan SKPD tidak memiliki unit kerja tersendiri yang mempunyai tugas untuk melakukan manajemen perangkat informasi.

5.2 Strategi SI/TI dan Manajemen SI/TI

Melihat hasil analisis terhadap kebutuhan bisnis dan informasi maka selanjutnya dapat ditentukan strategi SI/TI nya. Dimana strategi SI/TI akan menjelaskan bagaimana portfolio aplikasi SI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta serta infrastruktur TI Pemkab Purwakarta akan dibangun. Dan strategi manajemen SI/TI menjelaskan bagaimana SI/TI dikelola.

Penentuan strategi ini dimulai dengan merumuskan visi dan misi SI/TI yang akan menjadi pedoman pelaksanaan aktivitas bidang SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta.

5.2.1 Visi dan Misi SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Setiap organisasi memiliki tujuan, karakteristik, cara kerja, dan budaya masing-masing yang berbeda-beda, namun umumnya substansi dari visi dan misi SI/TI harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu gambaran umum tentang rumusan visi SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta adalah “Menjadikan *E-Government* sebagai strategi SI/TI untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah”.

Sedangkan rumusan misi SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi, adalah:

1. Penyediaan SI/TI yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja organisasi Pemda Kabupaten Purwakarta.
2. Penyedia SI/TI yang dapat memenuhi kebutuhan informasi keseluruhan SKPD untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
3. Penyediaan SI/TI untuk menciptakan peluang bagi peningkatan peran strategis Pemda Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi pemerintah daerah.
4. Pengelolaan sumber daya SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta secara efisien dan efektif
5. Peningkatan kualitas SDM Pemda Kabupaten Purwakarta dalam rangka penguasaan TI terkini.

5.2.2 Menentukan Strategi SI/TI

Penentuan strategi SI/TI didasarkan pada konfirmasi tujuan utama organisasi yang dijabarkan sebagai tujuan dan CSF setiap satuan kerja, sehingga pada prinsipnya strategi SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta adalah strategi-strategi SI/TI yang mendukung organisasi Pemda Kabupaten Purwakarta untuk :

- a) Bidang Ekonomi
- b) Bidang Keamanan dan Ketertiban
- c) Bidang Pendidikan
- d) Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
- e) Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata

Strategi SI/TI juga menjadi pijakan bagi penentuan portofolio aplikasi SI beserta dukungan infrastruktur TI-nya, yang harus dibangun oleh Pemda Kabupaten Purwakarta. Identifikasi solusi SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta ini dilakukan berdasarkan CSF organisasi dan kebutuhan informasinya yang dipadukan dengan analisis Value Chain. Selanjutnya, solusi SI/TI tersebut dipetakan dengan model McFarlan's Strategic Grid, untuk melihat gambaran kontribusinya terhadap organisasi.

5.2.2.1 Identifikasi Solusi SI/TI berdasarkan CSF

Berdasarkan identifikasi CSF dari setiap bagian didalam Sekretariat Daerah, maka kemudian ditentukan solusi SI/TI yang akan diterapkan. Uraian tentang penentuan solusi SI/TI berdasarkan CSF tersebut ditunjukkan pada tabel 5.10 untuk solusi SI/TI Bidang Ekonomi, tabel 5.11 untuk solusi SI/TI Bidang Keamanan dan Ketertiban, tabel 5.12 untuk solusi SI/TI Bidang Pendidikan, tabel 5.13 untuk solusi SI/TI Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial, tabel 5.14 untuk solusi SI/TI Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

Tabel 5. 10 Solusi SI/TI Bidang Ekonomi

No	Strategi Perusahaan	Kebutuhan Informasi	Strategi SI	Strategi TI
1	2	3	4	5
1	Penarikan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Sumber Pajak Daerah • Informasi APBN • Informasi Institusi atau lembaga pemberi modal • Informasi Pendapatan Daerah • Informasi Perda 	SI Pendapatan Daerah	Infrastruktur yang terintegrasi
2	Perolehan Dana Perimbangan			
3	Melakukan Pinjaman Daerah			
4	Penetapan APBD			

Tabel 5.11 Solusi SI/TI Bidang Keamanan dan Ketertiban

No	Strategi Perusahaan	Kebutuhan Informasi	Strategi SI	Strategi TI
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Keamanan dan Menjaga Ketertiban Masyarakat	Informasi Keamanan dan Ketertiban di Daerah	SI Keamanan Daerah	Infrastruktur yang terintegrasi Pemasangan CCTV

Tabel 5.12 Solusi SI/TI Bidang Pendidikan

No	Strategi Perusahaan	Kebutuhan Informasi	Strategi SI	Strategi TI
1	2	3	4	5
1	Peningkatan lebih dari 50% dari : <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Angka Melek Huruf (AMH) • Jumlah sarana dan prasarana pendidikan • Jumlah partisipasi belajar 	Informasi Prosentase Faktor Keberhasilan Pendidikan	SI Pendidikan SI Sekolah berbasis Web	Infrastruktur yang terintegrasi

Tabel 5.13 Solusi SI/TI Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

No	Strategi Perusahaan	Kebutuhan Informasi	Strategi SI	Strategi TI
1	2	3	4	5
1	Menurunkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan	Informasi Kependudukan	SI Kependudukan SI Kependudukan Kecamatan berbasis web	Infrastruktur yang terintegrasi

Tabel 5.14 Solusi SI/TI Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata

No	Strategi Perusahaan	Kebutuhan Informasi	Strategi SI	Strategi TI
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek wisata	Informasi pariwisata	SI Pariwisata	Infrastruktur yang terintegrasi

5.2.2.2 Portofolio Aplikasi SI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Mendatang

Seluruh solusi SI/TI yang telah diidentifikasi tersebut, dipetakan dengan matrik portofolio aplikasi McFarlan (Ward & Griffiths, 1996), untuk melihat gambaran tentang kontribusi setiap aplikasi terhadap organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta saat ini dan masa mendatang. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Portfolio SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Yang Akan Datang

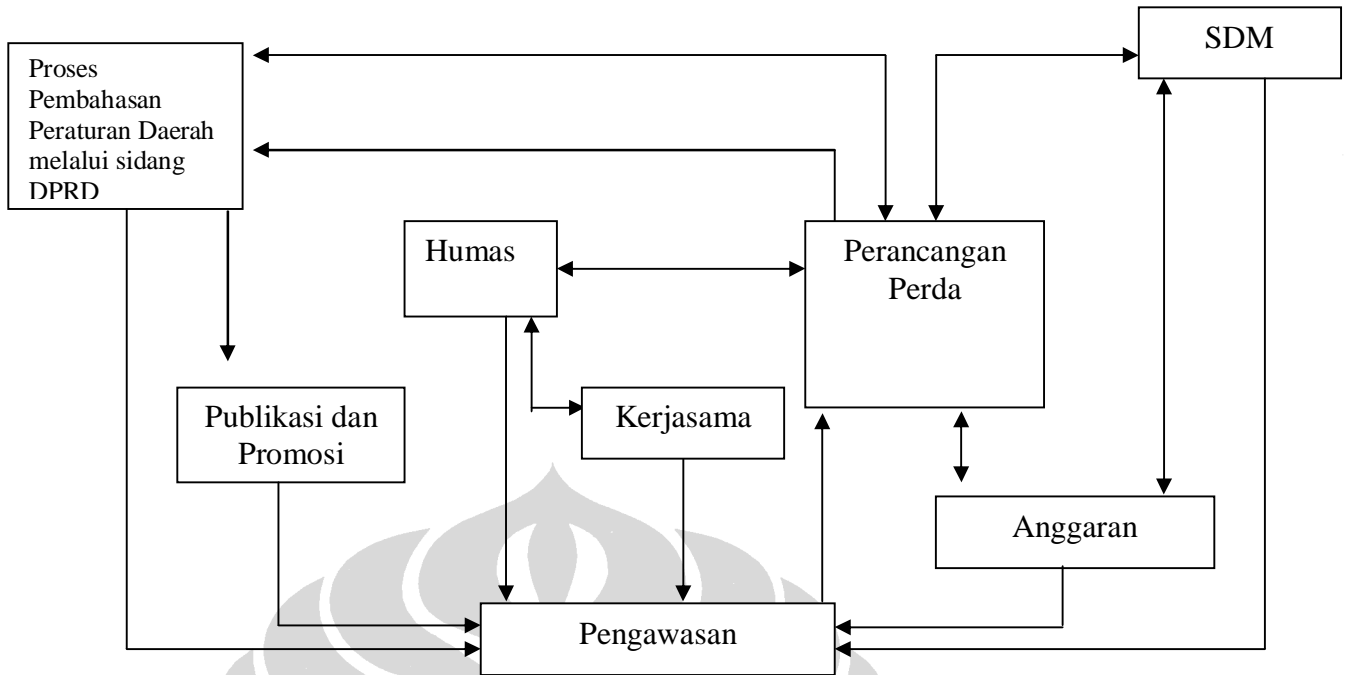
<i>STRATEGIC</i>		<i>HIGH POTENTIAL</i>	
SI Pendidikan SI Kependudukan SI Pariwisata	Baru Upgrade Upgrade	SI Pendapatan Daerah Pemasangan CCTV	Baru Baru
SI Sekolah berbasis web SI Kependudukan Kecamatan berbasis web	Baru Baru	SI Keamanan Daerah	Baru
<i>KEY OPERATIONAL</i>		<i>SUPPORT</i>	

5.2.2.3 Arsitektur Informasi dan Sistem

Arsitektur sistem informasi mempunyai fungsi untuk menggambarkan aliran informasi dan interaksi antara satu bagian dengan bagian yang lain, yang saling keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain sehingga dapat memberikan output sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini arsitektur informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terlihat seperti pada gambar 5.4.

Kegunaan arsitektur informasi ini adalah :

1. Sebagai panduan bagi operasi Sistem Informasi yang sekarang dan *blueprint* untuk pengembangan dimasa mendatang, sehingga dapat menghindari system yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi (Turban et al 1996).
2. Untuk mengidentifikasi dan mengontrol penanggung jawab data
3. Sebagai dasar untuk pengembangan system informasi secara bertahap dan menjaga konsistensi.
4. Menilai kontribusi system informasi yang ada saat ini, dan mengidentifikasi system informasi yang dibutuhkan (Tozer 1996).



Gambar 5.5 Arsitektur Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

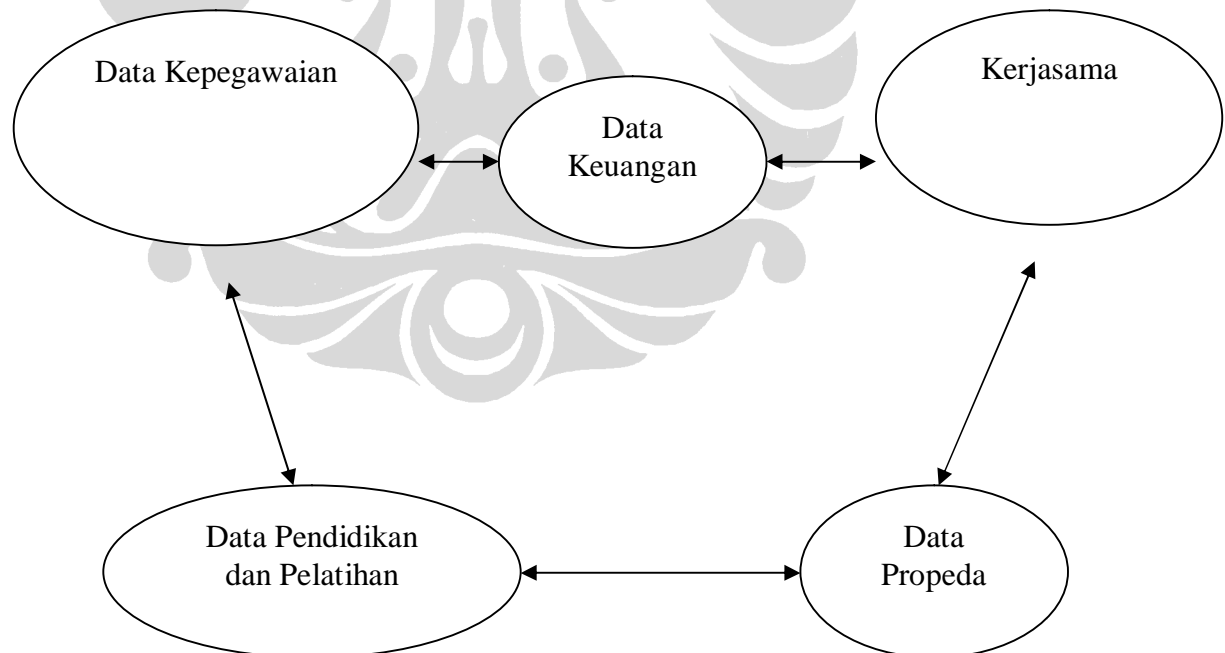
5.2.2.4 Analisis Data dan Pemetaannya Terhadap Solusi SI/TI Pemda Kab. Purwakarta

Data merupakan isi (*content*) yang sangat penting dalam suatu SI. Data dengan struktur yang baik dan dikelola dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Secara umum data yang diperlukan akan dikelola oleh portofolio aplikasi SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta serta satuan kerja yang mengelolanya terdiri dari lima kelompok data, yaitu :

1. Kelompok data yang berkaitan dengan aktivitas bidang Keuangan. Unit kerja yang bertanggungjawab atas kelompok data ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dibawah Asisten Daerah III bagian Keuangan.
2. Kelompok data yang berkaitan dengan aktivitas bidang Pegawai. Unit kerja yang bertanggungjawab atas kelompok data ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah dibawah bagian Kepegawaian.

3. Kelompok data yang berkaitan dengan aktivitas bidang Pengadaan Barang atau Jasa. Unit kerja yang bertanggungjawab atas kelompok data ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dibawah Asisten Daerah II bagian Perlengkapan.
4. Kelompok data yang berkaitan dengan aktivitas bidang Propeda, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial. Unit kerja yang bertanggungjawab atas kelompok data ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dibawah Asisten Daerah II bagian Pembangunan.
5. Kelompok data yang berkaitan dengan aktivitas bidang Pendidikan dan Latihan. Unit kerja yang bertanggungjawab atas kelompok data ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Skema yang menggambarkan keterkaitan antara kelompok data, dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut ini



Gambar 5.6 Skema Keterkaitan Dana SI/TI Pemda Kabupaten Purwakarta

Dari arsitektur informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, seperti terlihat pada gambar 5.5. maka dibuat hasil analisis berupa matrik penggunaan data yang biasanya

dikenal dengan CRUDM matrix (*Create, Read, Use, Delete, Modify*), dimana simbol CRUDM menjelaskan kewenangan aplikasi terhadap penggunaan kelompok data, yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi sistem aplikasi itu sendiri. Matrik untuk menentukan kewenangan aplikasi terhadap kelompok data, matrik tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Matrik Aplikasi dengan Kelompok Data

No	Kelompok Data					
	Aplikasi	Bidang Ekonomi	Bidang Keamanan dan Ketertiban	Bidang Pendidikan	Bidang Sosial Budaya, Kesehatan, Kes Sos	Bidang Budaya, Kesenian, pariwisata
1	2	3	4	5	6	7
1	SI Pendidikan	R	R	CRUDM	R	R
2	SI Kependudukan	R	R	R	CRUDM	R
3	SI Pariwisata	R	R	R	R	CRUDM
4	SI Pendapatan Daerah	CRUDM	R	R	R	R
6	SI Keamanan Darerah	R	CRUDM	R	R	R
7	Pemasangan CCTV	R	CRUDM	R	R	R
8	SI Sekolah berbasis web	R	R	CRUDM	RU	R
9	SI Kependudukan berbasis web	R	R	R	CRUDM	R

5.2.2.5 Strategi Pengembangan SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Strategi pengembangan SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten adalah hal yang penting dari semua strategi SI/TI, hal tersebut terlihat dari kelima dokumen yang dipakai sebagai dokumen perbandingan pada tulisan ini.

Kelima dokumen perencanaan strategis tersebut mempunyai banyak kesamaan, terutama dari dokumen perencanaan yang berasal dari lembaga pemerintah Amerika Serikat.

Kalau kita lihat dari 10 solusi yang dihasilkan pada penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa terdapat 5 aplikasi yang merupakan aplikasi yang perlu ditingkatkan kemampuannya dan 5 aplikasi yang merupakan aplikasi baru yang perlu dibangun dari awal.

Dalam menjalankan solusi yang dihasilkan dari penelitian ini, perlu diperhatikan bagaimana aplikasi tersebut akan dibangun atau bagaimana aplikasi tersebut ditingkatkan kemampuannya, apakah akan dilakukan sendiri atau akan mempergunakan pihak ketiga untuk melakukan solusi tersebut. Dan bila akan diberikan pada pihak ketiga, maka perlu diperhatikan bagaimana performa dari pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga tersebut harus mempunyai reputasi yang baik, memberikan harga yang kompetitif, serta memberikan dukungan layanan yang baik.

- **Konsep Rancangan Aplikasi**

Konsep rancangan aplikasi tersebut diarahkan dengan membangun aplikasi yang membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menyediakan interface kepada user dan bagian yang memproses dan menyimpan data kedalam database.

Aplikasi yang akan digunakan dalam menerapkan konsep tersebut digunakan aplikasi yang berbasis web based.

- **Kebutuhan Database**

Untuk aplikasi yang mendukung multi user (web based), dibutuhkan sistem database terpusat. Dimana database akan diarahkan pada penggunaan RDBMS (Relational Database Management System). Dan RDBMS yang pilih harus mempunyai kriteria: mempunyai dukungan layanan yang baik, kehandalan, skalabilitas, *failure handling*, *recovery capability* dan aspek keamanan yang baik, serta juga dengan tidak melupakan faktor harga yang harus kompetitif.

- **Kebutuhan Sistem Operasi**

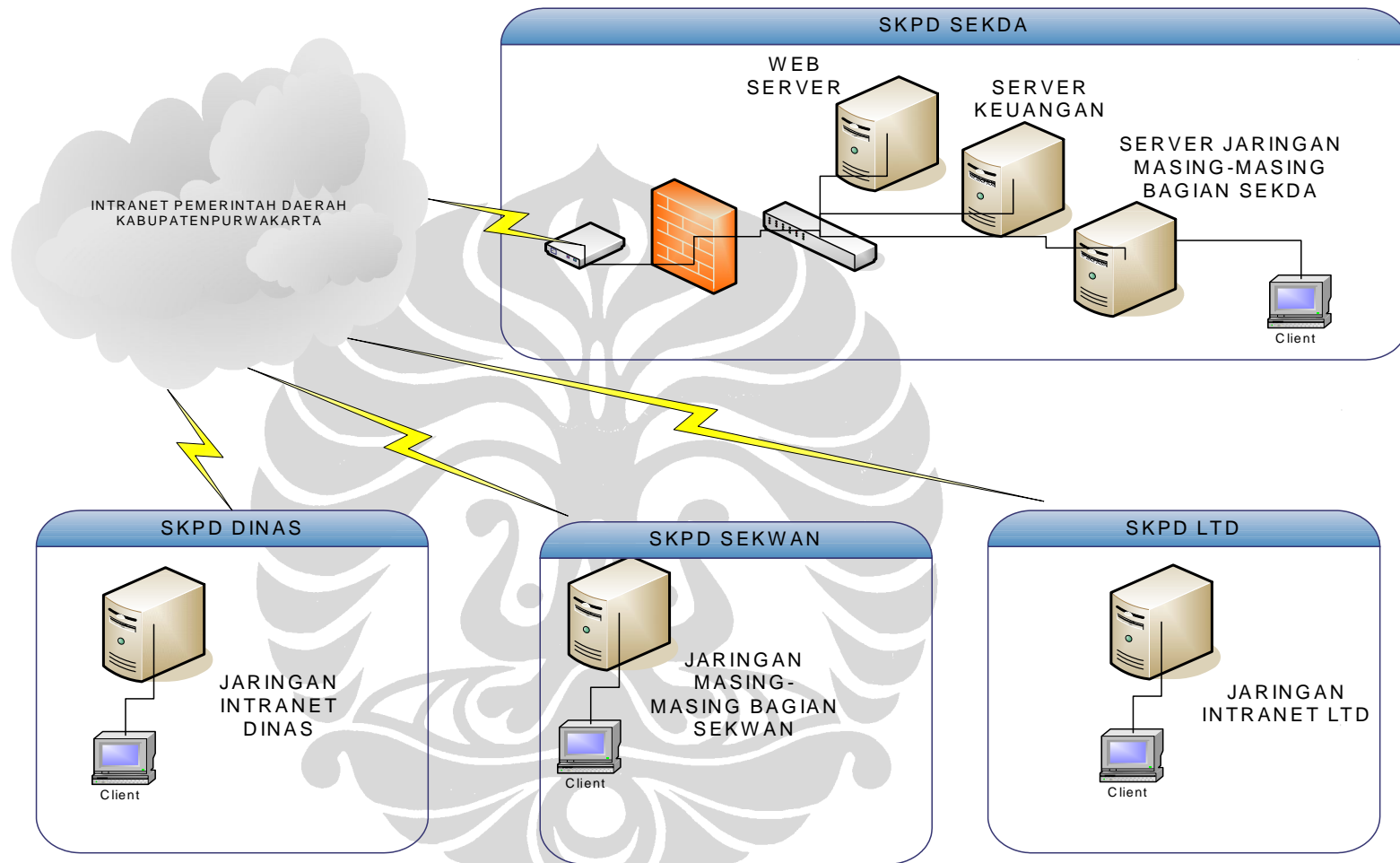
Untuk sistem operasi yang akan digunakan, baik untuk server atau untuk workstation akan diarahkan pada penggunaan sistem operasi yang open sources sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan instansi pemerintah untuk menggunakan produk open sources.

- **Platform Pengembangan Aplikasi**

Untuk pengembangan aplikasi kedepannya, terutama untuk aplikasi yang akan dibangun dari awal, harus memiliki kriteria seperti: perangkat lunak yang dibangun harus berbasis open sources dan web based serta mempunyai kehandalan yang cukup lumayan baik.

- **Usulan Konfigurasi Jaringan Komputer Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta**

Usulan konfigurasi infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, adalah sistem jaringan yang tidak melupakan faktor keamanan dalam perencanaannya, dimana Sekretariat Daerah dijadikan pusat dari seluruh aliran data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat diakses melalui intranet Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Usulan konfigurasi jaringan komputer tersebut dapat dilihat gambar 5.7.



Gambar 5.7 Usulan Konfigurasi Jaringan Komputer Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

5.2.2.6 Aspek Pengamanan SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Terdapat banyak tahapan dalam mengamankan suatu sistem informasi, namun pada awalnya kita harus membuat suatu kebijakan keamanan yang nantinya akan mendasari pembuatan perencanaan keamanan, apa yang disebut keamanan harus selalu memenuhi lima kebutuhan dasar:

- Kerahasiaan, dengan kemampuan scramble atau encrypt pesan sepanjang jaringan yang tidak aman
- Kendali akses, menentukan siapa yang diberikan akses ke sebuah sistem atau jaringan, sebagaimana informasi apa dan seberapa banyak seseorang dapat menerima
- Authentication, yaitu menguji identitas dari dua perusahaan yang mengadakan transaksi
- Integritas, menjamin bahwa file atau pesan tidak berubah dalam perjalanan
- Non-repudiation, yaitu mencegah dua pihak dari menyangkal bahwa mereka telah mengirim atau menerima sebuah file

• **Pengamanan Infrastruktur SI/TI**

Dalam melakukan suatu pengamanan infrastruktur SI/TI kita perlu mengambil kebijakan keamanan, yang didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang akan membantu memastikan setiap kinerja para karyawan dalam bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Semua batasan-batasan secara jelas

dipaparkan dalam perencanaan keamanan sehingga seluruh pegawai mengerti aturan-aturan yang berkaitan dengan keamanan basis data organisasi.

Ada empat aspek utama dalam keamanan SI/TI:

- *Privacy/Confidentiality* yaitu usaha menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses (mengaransi bahwa data pribadi tetap pribadi).
- *Integrity* yaitu usaha untuk menjaga data atau sistem tidak diubah oleh yang tidak berhak.
- *Authentication* yaitu usaha atau metoda untuk mengetahui keaslian dari informasi, misalnya apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar (asli) atau layanan dari server yang diberikan benar berasal dari server yang dimaksud.
- *Availability* berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data (informasi) ketika dibutuhkan.

Untuk melakukan perencanaan keamanan kita dapat mengacu pada Standard ISO 17799 , standard ini berkenaan dengan keamanan informasi. Standard ISO 17799 adalah merupakan suatu Standard Informasi *Security Management system* (Sistem Manajemen Informasi security) yang telah telah disempurnakan untuk digunakan oleh organisasi didalam mengamankan data yang dimilikinya.

- **Keuntungan ISO 17799**

ISO 17799 suatu standard internasional mempunyai nilai acuan dokumen yang memberikan sertifikasi keamanan kualitas internasional.

Sertifikasi disajikan sebagai jaminan terhadap keberhasilan usaha mewujudkan keamanan organisasi dalam setiap tingkatan, dan menunjukkan ketekunan yang seharusnya dari bagian administrasi.

Sertifikasi dari suatu sistem manajemen keamanan informasi adalah cara menuju keberhasilan jarak penglihatan eksternal, suatu pesan kuat ke arah suatu pasar yang mana terus meningkat ke arah permasalahan dalam keamanan, dan suatu faktor vitalitas untuk sistem manajemen dan memastikan efficiency/effectiveness adcompliance dengan memenuhi kebutuhan.

Sertifikasi menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa organisasi tersebut memperhatikan semua peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, standar ini melengkapi standar dan undangundang lainnya (Sebagai contoh HIPAA, Tindakan pribadi tahun 1974, Keamanan Komputer tahun 1987, Infrastruktur Nasional tahun 1996, Tindakan Gramm-Leach-Bliley tahun 1999, dan Tindakan Reformasi Keamanan Informasi Pemerintah tahun 2001).

- **Analisa derajat tingkat jaminan keamanan**

Analisa derajat tingkat jaminan keamanan diperlukan untuk dicapai melalui suatu pengendalian bahwa manajemen menciptakan dan memelihara organisasi. Pengaturan ke sepuluh kontrol / kendali yang ada pada ISO 17799 digunakan untuk mengimplementasikan suatu program keamanan informasi yang sukses, yaitu dengan:

- ***Information Security Policy***

Memanfaatkan kebutuhan bagi Kebijakan Keamanan Informasi untuk menyediakan arah manajemen dan dukungan bagi keamanan informasi.

- ***Security Organisation***

Struktur keamanan organisasi harus dengan jelas direncanakan.

- ***Asset Classification and Control***

Suatu nilai, mencerminkan dampak pada kerugian yang mungkin dimiliki organisasi. Keuntungannya : Tingkat keamanan, sesuai melindungi nilai informasi, dapat diterapkan.

- ***Personnel Security***

Keamanan Personil Staff harus dilatih, relevan dengan area yang mendukung kebijakan keamanan (mengidentifikasi pelanggaran atas kebijakan, staff vetting, persetujuan kerahasiaan dan tanggung-jawab individu untuk tugas spesifik).

- ***Physical and Environmental Security***

Phisik dan Keamanan Lingkungan Safe-Keeping informasi, di semua lingkungan di mana itu digunakan atau disimpan, harus dikendalikan dan dimonitor.

- ***Computer and Network Security***

Komputer Dan Keamanan Jaringan Prosedur yang didokumentasikan harus menunjukkan yang sekarang dan informasi baru, aman dari kerugian, atau penyingkapan.

- ***System Access Control***

Kendali Akses Sistem.Penekanan tertentu ditempatkan pada operasi sistem yang in-house dan rata-rata dengan masukan untuk system yang diperoleh.

- ***Systems Development and Maintenance***

Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Semua sistem baru harus diuji dan dikendalikan dari lingkungan.

- ***Business Continuity Planning***

Perencanaan Kesiambungan Bisnis harus disiapkan dan yang dibaharui untuk menilai orang agar dapat dipercaya setia di dalam sekarang dan lingkungan kerja yang ditinjau kembali.

- ***Compliance***

Pemenuhan Kebijakan Keamanan harus teraudit untuk memastikan bahwa itu mematuhi peraturan dan kebutuhan.

5.2.3 Strategi Manajemen SI/TI

Secara garis besar manajemen SI/TI adalah suatu cara mengelola SI/TI dengan merencanakan, menyediakan, mengoperasikan serta memelihara semua sumber daya SI/TI yang ada dan yang akan dibangun kemudian.

Dalam melakukan perencanaan strategis SI/TI akan menemui beberapa kendala yang harus dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan rasional, dimana dalam penyelesaian itu juga harus memperhatikan kebijakan yang telah ada, yang mengatur tentang SI/TI.

- **Perencanaan Kebijakan dan Strategi SI/TI**

Proses perencanaan strategis SI/TI dirancang untuk lebih efektif yang meliputi *stakeholder* dan untuk memberikan integrasi yang lebih baik dengan perencanaan lembaga pemerintahan yang lain.

Perencanaan kebijakan dan strategi SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara sentralisasi yang ditangani oleh Badan Informasi Daerah yang berfungsi sebagai pembuat pedoman pengolahan data, tempat pelatihan SDM, dan pengolahan data tertentu atau pesanan saja.

Perencanaan kebijakan dan strategi SI/TI Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta bersifat sentralisasi, hal ini disebabkan karena perangkat TI (desktop, laptop, printer, dan sebagainya) sudah tersebar banyak dilingkungan SKPD Pemda Kabupaten Purwakarta, dan tiap SKPD sudah mengolah datanya masing-masing dan menghasilkan informasi.

- **Pengembangan SI/TI**

Tugas dan fungsi SI/TI yang masuk kategori ini juga dilaksanakan secara terpusat oleh suatu Badan Informasi Daerah. Pengembangan SI/TI yang digunakan secara sharing oleh keseluruhan SKPD dilaksanakan oleh Badan tersebut, namun untuk fleksibilitas pengadaan dan pengembangan SI/TI yang spesifik (sesuai kebutuhan) suatu SKPD, dapat dilakukan oleh oleh SKPD yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Badan Informasi Daerah.

Pembagian tugas dari setiap layanan pengembangan SI/TI pada masing-masing SKPD dijelaskan pada tabel 5.17.

Tabel 5.17 Fungsi dan Layanan Badan Informasi Daerah Pemda Kab. Purwakarta

No	Bidang Tugas	Spesifikasi Tugas dan Fungsi	Terpusat	Tersebar
1	Perencanaan Kebijakan dan Strategi SI/TI	Analisis Bisnis	√	
		Pengembangan Strategi SI/TI	√	
		Pengembangan Standarisasi SI/TI	√	
		Pengembangan Prosedur	√	

		Operasional Standar		
		Pengembangan Kebijakan Pengamanan	√	
		Pelaksanaan Audit SI/TI	√	
		Penelitian dan Pengembangan	√	
2	Pengadaan dan Pengembangan	Analisis dan Desain SI/TI	√	√
		Pengadaan SI/TI	√	√
		Pengembangan dan Implementasi SI	√	√
		Manajemen Proyek	√	
3	Operasional dan Layanan SI/TI	Pelatihan SI/TI	√	√
		Operasional dan Perawatan Aplikasi	√	√
		Operasional dan Perawatan Data	√	√
		Operasional dan Perawatan TI	√	√
		Dukungan User	√	√

- **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan kuesioner didapatkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang ilmu komputer belumlah memadai, hal ini dapat menghambat penerapan SI/TI didalam lingkup Pemda Kabupaten Purwakarta. Perlu dibentuk suatu badan khusus yang menangani masalah SI/TI seperti KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik) atau Badan Informasi Daerah, Dinas Infokom, dan lain-lain.

Sehingga penyediaan sumber daya manusia yang handal dalam SI/TI dapat terpenuhi, baik itu melalui suatu pelatihan dan perekrutan PNS baru yang memiliki kemampuan dibidang komputer.

Hal ini di *drive* dengan perlunya pembentukan *e-Government Steering Committee*, *Management Project e-Government*, dan *Project Director* dimasing-masing SKPD, guna menghindari konflik antar SKPD, dikarenakan telah dikoordinasikan sebelumnya oleh *Managemen Project* atas mandat dari *Steering Committee* (ZAH, 2007).

5.3 Rencana Implementasi SI/TI

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah mendahulukan implementasi aplikasi-aplikasi yang bersifat strategis. Hal ini didasari oleh kekritisn kebutuhan dan optimalisasi pencapaian strategi organisasi. Dimulai dengan koordinasi SKPD yang terkait untuk perencanaan dan modifikasi aplikasi. Kecepatan proses dan integrasi aplikasi, serta data antar SKPD merupakan kunci sukse aplikasi. Kemudian implementasi dilanjutkan dengan aplikasi yang bersifat potensial tinggi dan operasional. Terakhir adalah pelaksanaan pembuatan aplikasi pendukung.

Tak kalah penting adalah *upgrade* situs pemerintah daerah kabupaten Purwakarta. Dari situs organisasi yang ter-*update* secara berkala dapat menjadi media untuk sosialisasi dan pemberian informasi bagi kepentingan masyarakat.

5.3.1 *High Level Tactical and Strategic Migration Plan*

Berdasarkan portofolo aplikasi yang akan diterapkan untuk mendukung strategi bisnis, maka rencana strategi migrasi ditunjukkan pada tabel 5.18.

Untuk menentukan skala prioritas dan aplikasi yang akan dibangun terlebih dahulu maka perlu pengamatan terhadap proses bisnis yang diprioritaskan kemudian dipetakan dengan pendekatan *outcome based* (Tozer, 1996).

Tabel 5.18 Rencana Strategis Migrasi [Gardner Consulting, 2002]

Aplikasi	2008				2009			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
SI Pendidikan		▶	▶	▶				
SI Kependudukan		▶	▶	▶	▶			
SI Pariwisata			▶	▶	▶			
SI Pendapatan Daerah		▶	▶	▶	▶			
SI Keamanan Darerah			▶	▶	▶			
Pemasangan CCTV						▶	▶	
Web Site Pendidikan					▶	▶		
Web Site Kependudukan							▶	▶
Web Site Pariwisata						▶	▶	

5.3.2 Proyek SI/TI sebagai Pendukung di SKPD

Pada tabel 5.19 berikut ini strategi untuk mendukung kebutuhan SI/TI di SKPD yang menjadi prioritas pencapaian visi dan misi Pemda Kabupaten Purwakarta.

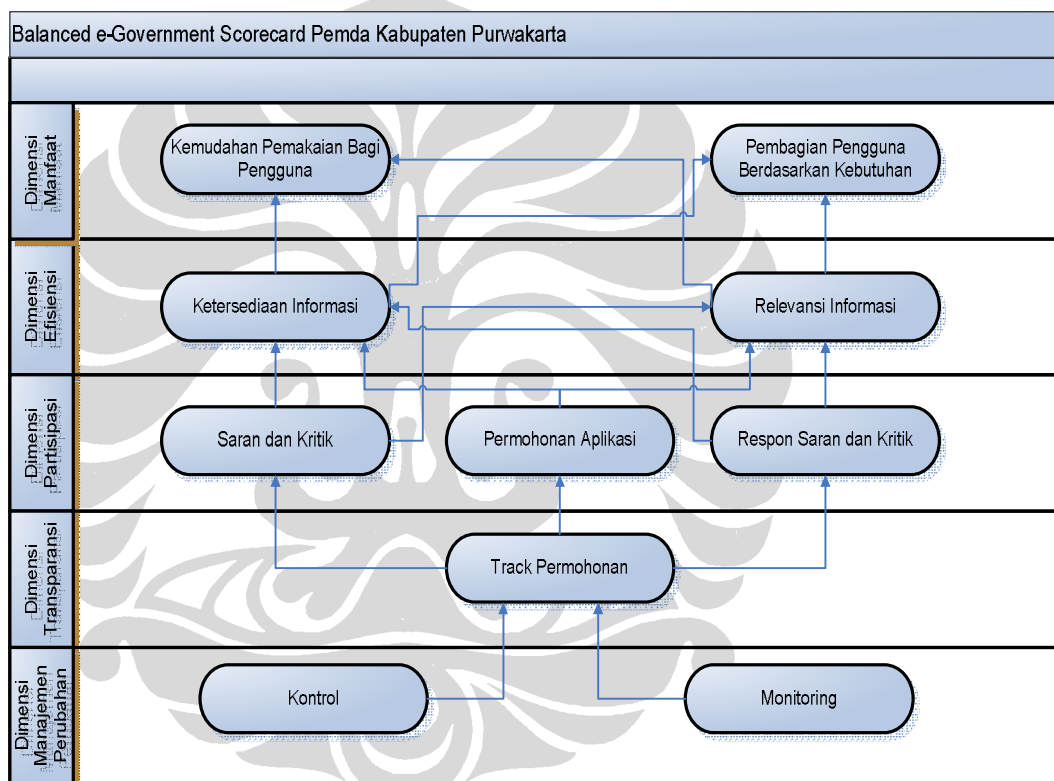
Tabel 5.19 Nama Proyek untuk SKPD [Gardner Consulting, 2002]

SKPD	Nama Proyek
Dinas Pendidikan	SI Pendidikan SI Sekolah berbasis Web
Dinas Pendapatan Daerah	SI Pendapatan Daerah
Badan Pariwisata	SI Pariwisata
Kantor Satpol PP	SI Keamanan Daerah Pemasangan CCTV
Dinas Kependudukan dan BPS daerah	SI Kependudukan SI Kependudukan Kecamatan berbasis web

5.4 *Balanced Scorecard*

Balanced scorecard sebagai salah satu alat pengukuran performa perusahaan, maka dalam *e-Government*, Booz Allen dan Hamilton dalam satu studinya bersama *Berstelment Foundation* mengenalkan apa yang disebut sebagai *balanced e-Government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan *e-Government*. Terdapat lima dimensi dalam *balanced e-Government scorecard* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih

detil. Kelima dimensi itu adalah: manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan (Stiftung, 2001). Hasil dari pemetaan *balanced e-Government Scorecard* dapat dilihat pada gambar 5.8.



Gambar 5.8 *Balanced E-Government Scorecard Pemda Kabupaten Purwakarta*

Hasil dari detail *strategic objectives* dapat dilihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20 *The Detail of Strategic Objectives*

<i>Strategic Objectives</i>	<i>Key Performance Indicators</i>	Target
Kemudahan Pemakaian Pembagian Pengguna sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang mengakses web Pemerintah • Jumlah pemanfaatan feature Web 	50%
Ketersediaan Informasi Relevansi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Timeliness • Completeness 	70%
Saran dan Kritik Permohonan Aplikasi Respon Saran dan Kritik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyampaian saran dan kritik • Jumlah Permohonan Aplikasi • Jumlah Respon Saran Kritik 	35%
Track Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Komplain masyarakat dan dunia bisnis • Kepuasan masyarakat dan dunia bisnis 	35%
Kontrol Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • Update Informasi • Pengembangan Feature • Maintenance Web Site 	70%

5.5 Penerapan E-Government di Pemda Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan pentahapan dalam penerapan e-Government disetiap lembaga pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2003, Purwakarta berada pada tahap pertama penerapan e-government. Adapun hasil yang dicapai pada tahapan pertama ini adalah:

- Pembuatan situs web pemerintah (www.purwakarta.go.id)
- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government;
- Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
- Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;

